

Judul : Komisi IX minta BGN terus benahi internal, 833 SPPG ditutup permanen
Tanggal : Jumat, 31 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

833 SPPG Ditutup Permanen Komisi IX Minta BGN Terus Benahi Internal

BADAN Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memecat 261 pegawai BGN yang terbukti bermasalah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap penutupan itu jadi momentum redesain tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles mengapresiasi langkah cepat Kepala BGN yang baru Sudaryono dalam melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Seharusnya unit pelayanan yang tidak laik operasional memang tidak diberikan izin beroperasi sejak awal. Ketegasan itu diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh penerima manfaat program ini.

Dia menilai, penutupan dapur bermasalah itu bukan sebuah terobosan, melainkan kewajiban dasar yang semestinya dijalankan BGN. Unit SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta kelayakan operasional memang tidak boleh diizinkan beroperasi. "Pengawasan ketat wajib diterapkan demi menjaga penerima manfaat," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Langkah yang dibutuhkan, kata Charles, sebenarnya bukan sekadar menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau muncul korban jiwa. BGN harus memastikan proses verifikasi serta perizinan di awal dilakukan secara ketat sejak dini. Dapur yang tidak memenuhi standar operasional seharusnya tidak boleh beroperasi sama sekali.

Dia menilai, pemecatan 261 pegawai BGN merupakan bentuk komitmen nyata untuk membersihkan lembaga dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Seluruh proses evaluasi serta penin-

dakan wajib dijalankan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Penegakan aturan yang tegas bakal menciptakan integritas lembaga yang sangat kuat.

Di bawah kepemimpinan Sudaryono, pembenahan diharapkan tidak berhenti pada pergantian orang atau tindakan korektif sesaat. Momen ini harus dijadikan landasan redesain total tata kelola Program MBG agar lebih aman serta akuntabel. "Pembenahan itu harus berpihak penuh pada kepentingan seluruh masyarakat," ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menambahkan, langkah itu sudah diusulkan DPR sejak kepemimpinan Nanik S Deyang. SPPG yang tidak berkualitas baik, mulai dari kondisi dapur sampai pendistribusian menu memang harus ditutup. Apalagi, banyak SPPG yang sudah dapat *ap-proval* dan dibangun 100 persen, masih menunggu operasional.

Sebelumnya, Sudaryono melakukan penutupan 833 SPPG yang melanggar standar kualitas hingga kebersihan operasional. Seluruh dapur yang tidak memenuhi ketentuan langsung dihentikan operasinya tanpa kompromi. Langkah tegas itu diambil karena keselamatan dan nyawa penerima manfaat merupakan prioritas paling utama lembaga.

Dia bilang, 833 dapur yang di-*suspend* itu tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan mencakup 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. "Langkah penertiban ini dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kualitas layanan," tegasnya. ■ PYB